

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- Ali, Ahmad. 2007. *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicial Prudence*. Makassar: Kencana.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 2000. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chazawi, Adami. 2018. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Depok: Rajawali Press.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Pranamedia Group.
- Efendi, Jonaedi dan J. Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Pranamedia Group.
- Farida, Maria. 2008. *Laporan Kompedium Bidang Perundang-Undangan*, Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional.
- Freidmen, Lawrence Meir. 2001. *American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika (terjemahan Wisnu Basuki)*. Jakarta: Tata Nusa Jakarta.
- Hadjon, Philipus Mandiri dan Tatiek Sri Djatmiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, Andi. 2008. *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, ed. 3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2012. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

- \_\_\_\_\_.2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. 2007. *Pengertian Tindak Pidana Korupsi*, ed. kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Luthfie, Salahuddin. 2012. *Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UI.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pernanda Media Group.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Kencana Pernanda Media Grup.
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2006a. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- \_\_\_\_\_. 2006b. *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhandar. 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Prinst, Darwan. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Citra Aditya.
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Cetakan Kedua. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2002. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya, cetakan kesebelas*. Yogyakarta: Kanisius, Marzuki.

Utrecht, 1983. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru.

### **Artikel dalam Jurnal**

Agustina, Shinta. 2015. "Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 44 No. 4. (503-510).

Amin, Subhan, dan Satria Unggul Prakasa Wicaksana. "Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Media of Law and Sharia* Vo.3.Hal.3 (2022): 205-218.

Ariyanti, Dwi Oktafia, dan Nita Ariyani. 2020. "Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol.27 No.2. (328-344).

Eddyono, Supriyadi Widodo. 2011. "Melihat Prospek Perlindungan Pelaku Yang Bekerjasama Di Indonesia" *Jurnal LPSK*. Vol.1 No.1 (104-108).

Harahap, Kurniawan. 2021. "Implementasi Hak-Hak *Justice Collaborator* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol.3 No.2 (282-312)

Hidayah, Nufus, dan Ade Mahmud. 2022 "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa yang Berstatus Sebagai *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi Kasus Suap Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra. "Bandung Conference Series: Law Studies. Vol.2. No.1 (842-851)

Mahardika, Agus Eka. 2020. "Kajian tentang Kebijakan *Justice Collaborator* dalam Kaitannya dengan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Hukum Positum*. Vol.5 No.1. (70-82).

Mahmud, Bahrudin. 2021. "Reposisi Kedudukan *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal USM Law Review*. Vol.4 No.1. (362-377).

Manalu, River Yohanes. 2015. "*Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Lex Crimen*. Vol. 4 No. 1. (152-163).

Mulyadi, Lilik. 2014. "Perlindungan Hukum *Whistleblower* Dan *Justice Collaborator* Dalam Upaya Penanggulangan *Organized Crime*" *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1 No.3. (578-597)

Pertiwi, Esti Kanti, dan Noor Rahmad. 2020. "Tinjauan Norma Hukum *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* pada Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Perspektif*. Vol.25 No.2. (92-106).

Pinem, Tomi Hagai. 2022 "Kedudukan *Justice Collaborator* Terhadap Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* Vol.4. No.2 (119-132).

PJ, Ayu Diah Pradnya Swari, dan Ni Nengah Adiyaryani. 2018. "Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana." *E-Journal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Vol.07. No.05 (1-14).

Pratama, Bagus Diyan, dan Budiarsih. 2023 "Analisis Kebijakan Kedudukan *Justice Collaborator* Dan *Whistleblower* Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Vol.3 No.1 (313-327).

Puluhulawa, M. D., Puluhulawa, F. U., & Ismail, D. E. 2020. "Anotasi Perlindungan Hukum *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Al Ahkam*. Vol.16 No.2. (56-74).

Semendawai, Abdul Haris. 2011. "Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban". Humas, Diseminasi, Hukum (HDH) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Vol. 1 No. 1. Jurnal Cetakan, 1. (250).

\_\_\_\_\_. 2016. "Penetapan Status *Justice Collaborator* bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*. Vol.3 Hal.3 (468-490.)

Sihite, Ocktresia M. 2019. "Alasan Yang Meringankan Hukuman Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana." *Usu Law Journal* Vol.7. N0.4: (74-83).

Suwito, Eddy. 2020. "Tinjauan Yuridis Keberadaan Saksi Sebagai *Whistleblower* dan *Justice Collaborators* Pada Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Sosial dan Keagamaan*. Vol.9 No.1. (81-103).

Utary, Ishariaty Wika. 2019. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia". *Jurnal Solid ASM Mataram*, Vol. 9 No.2 (187-198).

Yunus, Ahmad. 2017. "Penetapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai *Justice Collaborator*". *Simbur Cahaya*, Vol. 24, No.2 (4756-4771).

### **Karya Tulis Ilmiah**

Dewi, Nanda Alysia. 2019. *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan*



*Hukum Bagi Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) Pada Tindak Pidana Korupsi.* (Skripsi) Universitas Islam Negeri Palembang.

Dinanti, Pebrina Putri. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Pada Tindak Pidana Korupsi.* (Tesis) Program Studi Magister (S2) Universitas Jambi.

Liandiana, Riski Nurul. 2019. *Penerapan Justice Collaborator Pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.* (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Surya, Adi. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Tindak Pidana Korupsi.* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Thurmudhi, Imam, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Susno Duadji),* (Tesis) Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

#### **Artikel dalam Internet**

Basyaib, Hamid. 2022. “Demokrasi Versus Kelompok Kepentingan”. Tersedia pada <http://www.kolomkalam.com>. (diakses tanggal 1 September 2022).

Hukumonline. 2012. “Perbedaan Whistle Blower dan Justice Collaborator”. Tersedia pada <http://www.hukumonline.com>. (diakses tanggal 4 Oktober 2022).

Oka Mahendra, A.A.. 2010. “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta. Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan”. Tersedia pada <http://ditjenpp.kemendikham.go.id>. (diakses tanggal 25 November 2022).

Lakonawa, Petrus dan Shidarta. 2018. “*Lex Specialis Derogat Legi Generali: Makna Dan Penggunaannya*”. Tersedia pada <http://business-law.binus.ac.id>. (diakses tanggal 22 November 2022).

PPKN. 2022. “Hak Dan Kewajiban Warga Negara”. Tersedia pada <http://ppkn.co.id>. (diakses Pada 18 Oktober 2022).

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang–Undang Hukum

Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)

Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan LPSK tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice collaborators*) Di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

